



RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2025



Jl. KH. HASYIM ASHARI No.12
MOJOKERTO, JAWA TIMUR



(0321) 391268



diskominfo@mojokertokab.go.id



diskominfo.mojokertokab.go.id



KATA PENGANTAR



Drs. Ardi Sepdianto, M.Si.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran wujud nyata dari rencana pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan Renstra OPD. Renja ini selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 guna meningkatkan kinerja OPD.

Kami menyadari bahwa Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ini mungkin masih perlu penyempurnaan, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai pembelajaran (*Learning Procces*) demi penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) dimasa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Mojokerto, Juli 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700927 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
SK RENCANA KERJA	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2016-2021	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika	37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	53
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
BAB III	71
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	71
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika	78
3.3 Program dan Kegiatan	83
BAB IV	91
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V	119
PENUTUP	
5.1 Catatan Penting	119
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	119
5.3 Rencana Tindak Lanjut	120

DAFTAR TABEL

2.1.1	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	16
2.1.2	Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	23
2.2.1	Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto.	38
2.3.1	Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto	41
2.4.1	Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto	54
2.5.1	Kamus Usulan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	69
3.1.1	Hasil Telaah Kebijakan dan Program Nasional	75
3.1.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026	75
	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mojokerto	
3.1.3	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026	76
	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	
3.1.4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026	77
	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	
3.1.5	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025	79
3.1.6	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025	80
3.1.7	Cascading Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025	81
3.3.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	84
3.3.2	Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	87
4.1.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mojokerto Tahun 2025	93



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR: 188/1273/416-113/ 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian penjabaran, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto agar selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D)
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
20. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
21. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

22. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Renja Dinas KOMINFO 2025 adalah acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas.
2. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut Renja Dinas KOMINFO adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pasal 2

1. Renja Dinas KOMINFO 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 .
2. Renja Dinas KOMINFO 2025 menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025.

Pasal 3

Renja Dinas KOMINFO 2025 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Segenap unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto berkewajiban melaksanakan Renja Dinas KOMINFO 2025 dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : Juli 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si



1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Daerah dalam sistem pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD yang ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, masing-masing Perangkat Daerah juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) guna integrasi dengan RPJMD. Oleh karena itu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Mojokerto sehingga ada keselarasan antara visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dokumen Renstra dan Renja dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kabupaten Mojokerto menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terangkum dalam APBD Kabupaten Mojokerto.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah memandang perlu untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja tahun 2025.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan rencana untuk tahun anggaran 2025 yang menggambarkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan dinas yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2021-2026. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas akan diakomodir sebagai kegiatan dalam rancangan Renja PD. Renja tahun 2025 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas.

Sedangkan Renstra Tahun 2021-2026 menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas yang disusun ke dalam rancangan Renja yang selaras dengan Renstra. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra berdasarkan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan fungsi PD.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rancangan renja PD dibahas pada Forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Kemudian renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Universal Telekomunikasi dan Informatika;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
31. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD) Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto di tahun anggaran 2025 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yaitu memenuhi kebutuhan perangkat daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan untuk tahun 2025 yang memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di tahun anggaran 2025 dan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan Perangkat Daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis dan sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk APBD Tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 juga menjadi dokumen perencanaan di tahun pertama dari dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan- kegiatan prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto di Tahun 2025 yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat Kabupaten Mojokerto;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2025 yang berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025;
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah;
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah dengan capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- e. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- f. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- g. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang :

1. Renja Perangkat Daerah
2. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah
3. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L dan Renja Provinsi
4. Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap pelaksanaan Renja SKPD tahun ini dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun ini.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah OPD baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto maka evaluasi yang di lakukan di tahun ini adalah sebagai evaluasi dasar sebagai acuan renja tahun yang akan datang.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun lalu berjalan (tahun n-1)

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada kepala perangkat daerah.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsinya perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 yang didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan tugas dan fungsi pada urusan wajib bukan pelayanan dasar yang meliputi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target serta memenuhi output yang ditetapkan. Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan yang terdiri dari 15 sub kegiatan rutin (program penunjang urusan pemerintahan daerah) dan 18 sub kegiatan pembangunan. Adapun capaian kinerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 yang tertuang dalam LKjIP Tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik dengan target 100%, dan realisasi sebesar 100,96% sehingga tingkat capaian 100,96% dengan predikat sangat baik.
2. Indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 85,6 (A) dan realisasi sebesar 85,20 (A) sehingga tingkat capaian 99,53%

dengan predikat sangat baik.

Indikator persentase realisasasi anggaran Perangkat Daerah dengan target 92% dan realisasi sebesar 96,71% sehingga tingkat capaian 105,12% dengan predikat sangat baik

Indeks Profesionalitas ASN dengan target 89,9 dan realisasi sebesar 89,81 sehingga tingkat capaian 99,90% dengan predikat sangat baik.

3. Indikator Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target 14 inovasi dan realisasi sebanyak 16 inovasi meliputi 3-office, e-agenda, si-jamed, e-sppd, satu data palapa, damarmojo, CIS, Call Center 112 Surya Mojo Siaga, *Smart City*, SIAPO (Sistem Informasi Absensi Pegawai Online), Executive Dashboard Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Super apps (laporan administrasi pemerintahan e-office) modul pelaporan kegiatan Kepala OPD, Super apps (laporan administrasi, Super Apps Layanan Publik (JayaSeva Mojokerto) Layanan Publik Warga Kabupaten Mojokerto, Data Warehouse Satu Data Palapa, E-Stunting, Bunda PAUD dan Si Penting.

Dari hasil kesuluruhan pencapaian kinerja diperoleh sebagian besar persentase capaian dari realisasi dan target menunjukkan pencapaian yang sangat baik.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Indikator Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik telah melebihi target dan realisasi sebesar 100,96% sehingga tingkat capaian 100,96% dengan predikat sangat baik dikarenakan adanya perubahan pada penetapan target kinerja yaitu 100% dengan formulasi penghitungan.

Sedangkan Indeks SPBE berdasarkan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang menjadi tujuan dan Indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 terjadi kenaikan nilai yang signifikan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Kementerian PAN-RB terkait analisa atas aspek penilaian indeks SPBE di tahun 2023 dapat disampaikan bahwa penerapan SPBE menggambarkan predikat Sangat Baik (3,52) dari target yang ditetapkan yaitu 2,7.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelengara SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang meliputi Kebijakan implementasi SPBE yang telah disahkan oleh peraturan bupati, Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, audit TIK dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE yang telah dilakukan reviu dan evaluasi serta sebagian telah terdapat tindak lanjutnya. Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE dapat terlihat dengan adanya Inovasi Proses Bisnis SPBE, Arsitektur SPBE serta Rencana dan Anggaran SPBE yang telah dilakukan reviu dan evaluasi serta sebagian telah ditindaklanjuti. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi tampak dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE dan Layanan Pusat Data yang telah dilakukan reviu dan evaluasi. Pada Aspek Penyelengara SPBE memiliki potensi peningkatan tingkat kematangan pada indikator Tim Koordinasi SPBE Instansi dan Kolaborasi Penerapan SPBE yang masih pada tataran belum seluruhnya terjadi diseluruh unit. Sedangkan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik didapatkan adanya Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah dan Layanan Kinerja Pegawai. Dimana Pemda telah menggunakan layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disediakan oleh pemerintah dengan penggunaan sampai proses kolaborasi dan telah terdapat tindak lanjutnya pada indikator Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Selanjutnya, pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik Pemkab Mojokerto memiliki Layanan Publik Sektor 1, Layanan Data Terbuka dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang keseluruhan telah mencapai penggunaan sampai tingkat kolaborasi, dan pada Layanan Publik Sektor 1 telah sampai pada level otimum.

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih

belum memiliki tingkat kematangan Penerapan Manajemen SPBE yang cukup yang mengatur terkait Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data. Hal ini dikarenakan masih perlunya perencanaan dan penyusunan pedoman pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada aspek Audit TIK, Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih belum memiliki tingkat kematangan Audit TIK yang cukup yang mengatur terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, karena masih belum memiliki pedoman dan standarisasinya.

Pada Penerapan Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebenarnya sebagian besar indikator program telah memiliki perencanaan tetapi belum memiliki pedomannya dan sebagian lagi telah terdapat pelaksanaannya tetapi tidak memiliki perencanaan. Oleh sebab itu dalam hal pemenuhan Penerapan Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat menyusun perencanaan maupun pedoman dalam pelaksanaannya. Sedangkan pada Audit TIK kurang lebih sama gambarannya dengan aspek Penerapan Manajemen SPBE yakni perlunya kelengkapan pedoman terhadap pelaksanaan audit, baik pada Audit keamanan SPBE, audit aplikasi dan Audit Infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa menggunakan acuan yang yang dikeluarkan oleh BSSN, sehingga pelaksanaan audit selanjutnya telah memenuhi standar yang berlaku. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat melakukan inisiatif lebih lanjut dalam penerapan Manajemen SPBE dan Audit SPBE sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagian besar realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah mencapai target atau dalam kategori pencapaian sangat baik. Pada Tahun 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan terhadap pencapaian target indeks SPBE dari target yang telah ditetapkan yaitu 2,7, sedangkan nilai indeks SPBE yaitu 3,52 dengan predikat sangat baik. Hal ini menjadi faktor penunjang terhadap

keberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Adapun rencana upaya perbaikan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Secara konsisten melakukan upaya pemenuhan target indikator
2. Mempertahankan indikator-indikator di dalam Indeks SPBE yang sudah mencapai nilai maksimal 5, serta meningkatkan nilai capaian atas indikator-indikator dalam Indeks SPBE.

Tabel 2.1.1
Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET (ANGGARAN)	REALISASI (ANGGARAN)	% PENYERAPAN ANGGARAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		100,00%	97,60%	97,60%	6.022.865.000	5.429.655.088	90,15%
		Percentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100,00%	100,00%	100,00%			
		Percentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,00%	96,71%	105,12%			
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	89,90	89,81	99,90%			
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,6 (A)	85,2 (A)	99,53%			
		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan berkelanjutan	14 inovasi	16 inovasi	114,29%			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	100%	100,00%	100,00%	17.500.000	17.104.600	97,74%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	7.500.000	7.405.600,00	98,74%

2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	100,00%	10.000.000	9.699.000,00	96,99%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	85,29%	85,29%	4.205.960.000	3.646.206.216	86,69%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	85,29%	4.205.960.000	3.646.206.216,00	86,69%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	100%	100,00%	150.000.000	150.000.000	100,00%
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81 Orang	81 Orang	100,00%	150.000.000	150.000.000,00	100,00%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100,33%	100,33%	1.122.007.810	1.112.685.691	99,17%
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00%	996.257.810	989.025.200,00	99,27%
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100,00%	26.750.000	26.076.900,00	97,48%
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00%	20.000.000	19.964.500,00	99,82%
8	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00%	24.000.000	23.632.790,00	98,47%
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	100,00%	5.000.000	4.707.000,00	94,14%

10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	51 Laporan	102,00%	50.000.000	49.279.301,00	98,56%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	150.000.000	129.517.808	86,35%
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	108.000.000	87.517.808,00	81,04%
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	42.000.000	42.000.000,00	100,00%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	377.397.190	374.140.773	99,14%
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	100,00%	100.000.000	99.896.000,00	99,90%
14	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100,00%	240.397.190	237.519.773,00	98,80%
15	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	100,00%	37.000.000	36.725.000,00	99,26%

II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Percentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	100%	97,47%	97,47%	5.895.774.000	5.859.463.000	99,38%
7	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Percentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	97,47%	97,47%	5.895.774.000	5.859.463.000	99,38%
16	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	634.500.000	633.386.000,00	99,82%
17	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	14 dokumen	14 dokumen	100,00%	1.230.194.000	1.205.078.000,00	97,96%
18	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	444.880.000	436.376.559,00	98,09%
19	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	95 layanan	83 layanan	87,37%	3.585.000.000	3.583.422.441,00	99,96%
20	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1.200.000	1.200.000,00	100,00%
III	Program Aplikasi Informatika	Percentase Penyelenggaraan SPBE	100%	98,57%	98,57%	10.197.536.000	10.094.528.220	98,99%
8	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Percentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100,00%	8.499.000.000	8.496.960.440	99,98%
21	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	99 Unit	99 Unit	100,00%	8.499.000.000	8.496.960.440	99,98%

9	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Percentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	97,14%	1.698.536.000	1.597.567.780	94,06%
22	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1.013.000.000	955.573.056	94,33%
23	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	120.000.000	119.214.000	99,35%
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	74.320.000	73.000.000	98,22%
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah	100,00%	49.616.000	49.000.000	98,76%
26	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10 Layanan	8 Layanan	80,00%	50.000.000	48.140.000	96,28%
27	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	66.600.000	63.819.724	95,83%

28	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	325.000.000	288.821.000	88,87%
IV	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Percentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto	100,00%	112,50%	112,50%	225.000.000	224.054.905	99,58%
10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Percentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Mojokerto	100,00%	112,50%	112,50%	225.000.000	224.054.905	99,58%
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	16 Dokumen	18 Dokumen	112,50%	225.000.000	224.054.905	99,58%
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Percentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	77%	66,67%	86,58%	160.423.000	153.602.200	95,75%
11	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Percentase Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100,00%	100,00%	100,00%	110.423.000	106.522.200	96,47%
30	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	21.944.000	21.141.000	96,34%

31	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	39.100.000	37.483.000	95,86%
32	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	49.379.000	47.898.200	97,00%
12	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Percentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	100,00%	33,33%	33,33%	50.000.000	47.080.000	94,16%
33	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	57 Perangkat Daerah	19 Perangkat Daerah	33,33%	50.000.000	47.080.000	94,16%
						22.501.598.000	21.761.303.413	96,71%

Tabel T-C 29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		100%	99,61%	100%	97,60%	97,60%		97,60%	
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	95%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	84,14%	92%	96,71%	105,12%	93%	96,71%	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	85%	80,23%	89,90	89,81	99,90	83%	89,81	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,12 (A)	85,51 (A)	85,60 (A)	85,2 (A)	99,53%	82,53 (A)	85,2 (A)	
		Nilai RB Perangkat Daerah		83,25 (A)				80 (BB)		
		Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan			14 inovasi	16 inovasi	114,29%	19	16 inovasi	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	35 dokumen	7 dokumen							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen		
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	30 dokumen/ laporan	6 dokumen/ laporan							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	7 laporan		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	100%				100%			
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	12 bulan							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			34 orang/ 14 bulan	29 orang/ 14 bulan	85,29%	34 orang/ 14 bulan	29 orang/ 14 bulan		
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun sesuai Ketentuan	60 bulan								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12 dokumen			
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	360 pegawai	32 pegawai							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1 paket			
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Terlapor	75 dokumen/ laporan								

		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							15 dokumen		
2.16.01.2.05.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Junlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			81 Pegawai	81 Pegawai	100%	81 Pegawai	81 Pegawai		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	97,68%							
		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan			100%	100,33%	100,33%	100%	100,33%		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 bulan	12 bulan							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket		
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 bulan	12 bulan							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket		
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	60 bulan	12 bulan							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	10 Paket		
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 bulan	12 bulan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket		
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan / Material	60 bulan	12 bulan							
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket		

2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 bulan	12 bulan							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan		
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bulan	12 bulan							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50 Laporan	51 Laporan	102%	60 Laporan	51 Laporan		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%							
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan						100%			
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 kendaraan dinas								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						3 unit			
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%							
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	12 bulan							

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	12 laporan	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bulan	12 bulan						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	12 laporan	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%						
		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik			100%	100%	100%	100%	100%	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 kendaraan dinas	14 kendaraan dinas						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60 bulan	12 bulan						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Terpenuhinya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60 bulan	12 bulan						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	

2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Percentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	88%	88%	100%	97,47%	97,47%		97,47%	
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	IK : Indeks Keterbukaan Informasi Publik						71		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Percentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	88%	88%	100%	97,47%	97,47%		97,47%	
		Percentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan						100%		
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo	84%, 600 berita	88,98%, 120 berita						
		Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas								
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Percentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan STRAKOM	75%							
		Jumlah Konten Media Komunikasi Publik Daerah yang Terkelola	4.080 konten							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			12 dokumen	12 dokumen	100%	13 dokumen	12 dokumen	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Percentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	80%	90%						
		Jumlah media luar ruang	180 media luar ruang	36 media luar ruang						

		Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan	25 rubrik	-						
		Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah	285 video	77 video						
		Jumlah Terpublikasinya Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah	2400 berita	839 berita						
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			14 dokumen	14 dokumen	100%	24 dokumen	14 dokumen	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	100%						
		Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID	70 informasi	71 informasi						
		Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang Tersesuaikan	800 pengaduan yg tersesuaikan	50 pengaduan yg tersesuaikan						
		Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT	3 kelompok masy.milenial yg terlatih IT	13 kelompok masy.milenial yg terlatih IT						
		Jumlah Layanan Call Center	33 layanan call center	13 layanan call center						
		Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang Tersesuaikan	150 pengaduan yg tersesuaikan	82 pengaduan yg tersesuaikan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			4 Dokumen	4 Dokumen	100%	14 Dokumen	4 Dokumen	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi	390 hubungan media	94 hubungan media						
		Jumlah Layanan Hubungan Media			95 layanan	83 layanan	87,37%	95 layanan	83 layanan	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	70 KIM yang aktif	10 KIM yang aktif						

		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	1 dokumen	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	20 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik							
		Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						5 unit		
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Percentase Penyelenggaraan SPBE	85%	85%	100%	98,57%	98,57%		98,57%	
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE						2,3		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Percentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
		Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo						100%		
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Percentase pengelolaan subdomain (website PD)	73%							

		Jumlah Dokumen Panatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4 dokumen		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%							
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			99 unit	99 unit	100%	99 unit	99 unit		
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	84%	96,25%							
		Tingkat kematangan aspek teknologi informasi pada domain tata kelola SPBE						-			
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	2 kebijakan	2 kebijakan							
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100%							
		Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online	100%	100%							
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen		
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kesesuaian Penganggaran SPBE dengan Arsitektur SPBE	80%								

		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik							2 dokumen		
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pemda	78%								
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola							2 unit		
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi dalam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	100%	100%							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen		
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100%	100%							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen		
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam dashboard command centre	100%	8,77%							
		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah	100%	57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	70%	74%							
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan							50 unit		
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase PD yg memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah	70%	0%							

		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			10 layanan	8 layanan	80%	12 layanan	8 layanan	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Persentase kegiatan yang terfasilitasi command center ; Persentase implementasi smart government	92% ; 70%	66% ; 100%						
		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	15 orang	10 orang						
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						2 dokumen		
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah rekomendasi/persetujuan	50 rekomendasi/persetujuan	15 rekomendasi/persetujuan						
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)						1 dokumen		
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan monev SPBE yang terlaksana	20 kegiatan	4 kegiatan						
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	80%	98,53%	77%	66,67%	85,58%		66,67%	
		Indeks KAMI						300		

2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Percentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	80%	70,04	100%	100%	100%		100%	
		Percentase Layanan Elektronik yang Diamankan						80%		
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	10 kebijakan	2 kebijakan						
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Percentase Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	10 Sistem Elektronik	3 Sistem Elektronik						
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik	11 Sistem Elektronik	3 Sistem Elektronik						
		Indeks KAMI	sistem elektronik bernilai tinggi(20) & status kesiapan cukup (500)	sistem elektronik bernilai rendah (15) & status kesiapan cukup (123)						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	

2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Percentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	37%	26,31%	100%	33,33%	33,33%		33,33%	
		Percentase OPD yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi						100%		
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Percentase titik PHKS yang diamankan	37%	26,31%						
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			57 Perangkat Daerah	19 Perangkat Daerah	33,33%	57 Perangkat Daerah	19 Perangkat Daerah	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Percentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto	80%	119,83%	100%	112,50%	112,50%		112,50%	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)						3		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Percentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Mojokerto	80%	119,83%	100%	112,50%	112,50%		112,50%	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Percentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik						100%		
		Percentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						100%		
		Percentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah						100%		

		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN)							68,42%		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah							
		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto	3000 data	2190 data							
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			16 dokumen	18 dokumen	112,50%	18 dokumen	18 dokumen		
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Pengelola Data Statistik yang Terlatih	60 pengelola								
		Jumlah Statistik Sektoral per Bidang Urusan yang Teranalisis	10 dokumen								
		Tersedianya buku/video profil daerah	5 buku/video profil daerah								
		Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Staistik Daerah yang Terintegrasi						108 orang			
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	70%								
		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun						29 dokumen			
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik						2 unit			
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Kebijakan Statistik Sektoral	2 kebijakan								
		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan target. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik	81%	82%	83%	84%	85%	103%	100,96%				- Realisasi kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 terdapat penurunan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan akan indikator kinerja di tahun 2023 berdasarkan kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
2	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%				
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%	90%	90%	90%	84,14%	96,71%				
	Indeks Profesionalitas ASN	80%	82%	83%	84%	85%	81,61% (2021)	89,91 (2022)				

	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,92 (A)	81,72 (A)	82,53 (A)	83,32 (A)	84,12 (A)	85,51 (A)	85,20 (A)				Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berpengaruh terhadap realisasi kinerja pada level kegiatan dan program. Sedangkan target yang ditetapkan menjadi terlalu rendah. Akan tetapi telah dilakukan perubahan akan target kinerja pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 sehingga capaian kinerja sesuai target Renstra tahun 2021-2026 terdapat perbedaan capaian.
	Nilai RB Perangkat Daerah	78 (BB)	79 (BB)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	83,25 (A)	-				
3	Persentase Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik	86%	86%	87%	87%	88%	95,16%	97,47%				
4	Persentase Penyelenggaraan SPBE	81%	82%	83%	84%	85%	98,13%	98,57%				
5	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Mojokerto	76%	77%	78%	79%	80%	119,83%	112,50%				
6	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	76%	77%	78%	79%	80%	74,88%	66,67%				- Sedangkan dalam rangka penetapan IKU yang SMART di tahun 2024 telah dilakukan perubahan IKU sehingga IKU Dinas Komunikasi dan Informatika sama dengan Indikator pada RPJMD Tahun 2021-2026
7	Indeks SPBE	-	-	3,75	3,8	3,9	-	-				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk dapat mencapai penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto masih keterkaitan dengan baik dengan tingkat provinsi atau kabupaten dan kota lain maupun tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Identifikasi Permasalahan Pembangunan			Isu-Isu Strategis
Urusan / Bidang Urusan	Permasalahan	Akar Permasalahan	
Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengklasifikasikan informasi publik dan informasi yang dikecualikan serta masih kurangnya layanan informasi publik kepada masyarakat/pihak yang memerlukan dan berkepentingan	1. Belum optimalnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik
	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait literasi digital utamanya pilar digital ethics dan digital safety		
	KIM belum berfungsi optimal sebagai bagian dari upaya diseminasi informasi kegiatan pemerintah	2. Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik	
	Kurangnya atensi dan engagement masyarakat Kabupaten Mojokerto terhadap informasi seputar Pemkab Mojokerto baik dalam bentuk informasi program maupun kegiatan		
	Kurangnya respon Perangkat Daerah terkait dalam menanggapi aspirasi/opini masyarakat yang disampaikan melalui media massa (media cetak dan media cyber)		

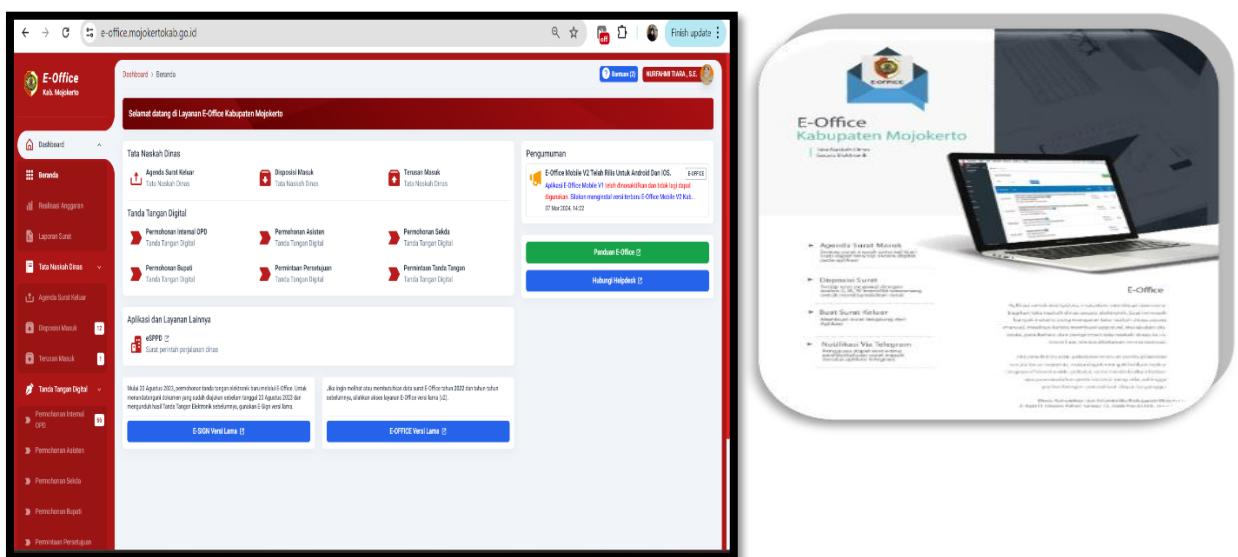
Identifikasi Permasalahan Pembangunan			Isu-Isu Strategis
Urusan / Bidang Urusan	Permasalahan	Akar Permasalahan	
Komunikasi dan Informatika	<p>Integrasi aplikasi atau layanan masih menjadi permasalahan yang selalu mengemuka ketika diperlukan konektifitas dan interoperabilitas data. Dalam skala kecil, permasalahan ini muncul ketika interkoneksi antara 2 aplikasi diperlukan. Sedangkan dalam skala besar adalah bagaimana seluruh layanan digital yang ada di Kabupaten Mojokerto terintegrasi dan saling bersinergi. Tahun 2023 sudah direncanakan pembangunan Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Pemerintah kabupaten Mojokerto. Maka tantangan berikutnya adalah bagaimana sistem ini digunakan secara maksimal sehingga integrasi aplikasi dan interoperabilitas data di Kabupaten Mojokerto bukan sekedar gimmick saja.</p>	1. Kurang optimalnya tatakelola TI	Belum optimalnya tatakelola, infrastruktur dan sistem informasi
	Digitalisasi tanpa akses internet yang memadai adalah mustahil. Diperlukan akses internet yang stabil, lancar dan aman untuk seluruh stakeholder internal di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.	2. Kurang optimalnya pengembangan infrastruktur TI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan digitalisasi mengharuskan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus mengembangkan aplikasi dan mengelolanya dengan baik. Dibutuhkan SDM yang cukup dan mumpuni. • Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tuntutannya semakin tinggi 	3. Kurang optimalnya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi	
Persandian	Website, aplikasi dan infrastruktur pemerintah adalah target hacker dalam mencari reputasi. Seringkali web dan aplikasi Pemkab Mojokerto di-deface atau bahkan dihapus oleh hacker.	1. Rentannya keamanan informasi	Belum optimalnya keamanan teknologi informasi

Identifikasi Permasalahan Pembangunan			Isu-Isu Strategis
Urusan / Bidang Urusan	Permasalahan	Akar Permasalahan	
Statistik	Dalam publikasi / diseminasi data statistik sektoral pada portal Satu Data Palapa, masih terdapat Perangkat Daerah yang belum bisa menyediakan data sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditetapkan	1. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia
	Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terkait penyusunan metadata statistik sektoral yang menjadi kewajibannya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia		
	Pengumpulan data statistik sektoral dari instansi vertikal yang ada di Kabupaten Mojokerto masih belum dapat dilaksanakan karena belum adanya MoU antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan instansi vertikal dimaksud		

Sebagai upaya dalam menghadapi dan mengatasi isu isu strategis dan permasalahan diatas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto telah menerapkan teknologi informasi pada sebagian besar pelayanan dan sebagian sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi melalui :

1. Layanan Tata Naskah Dinas melalui www.e-office.mojokertokab.go.id

Tata naskah dinas (surat dinas, disposisi dll) adalah urat nadi yang bertanggung jawab terhadap berjalannya sebuah sistem birokrasi. Kecepatan lalu lintas yang dijalankan melalui sistem tata naskah dinas inilah yang menentukan baik buruknya kualitas layanan birokrasi di pemerintahan. Aplikasi *e-office* memberikan kemudahan bagi perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan tata naskah dinas, seperti persuratan, tanda tangan dan pengiriman surat yang semuanya telah dilakukan secara online. Aplikasi *e-office* telah tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara melalui proses panjang dan tidak mudah. Melalui *e-office* tidak perlu lagi mengirimkan surat ke OPD dengan waktu lama, cukup 1 detik surat telah sampai ke OPD yang dituju. Tanda tangan dokumen, tanpa perlu menunggu pejabat terkait, cukup dengan membuat permohonan tanda tangan, secara otomatis akan sampai digenggaman pejabat yang dituju.



Gambar 2.3.1

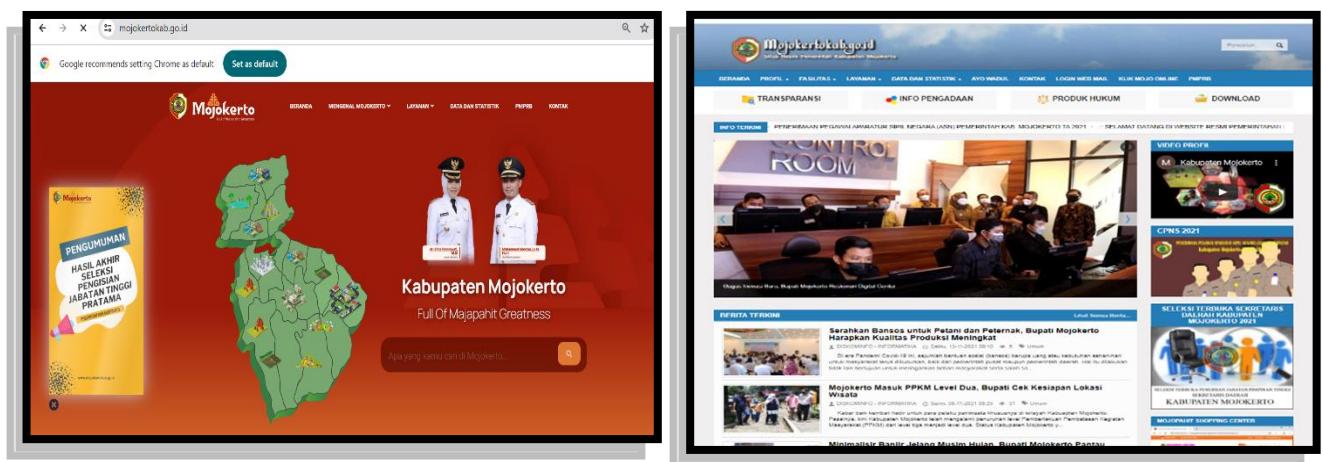
Screenshot www.e-office.mojokertokab.go.id

2. Layanan Informasi Dan Dokumentasi

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik dan

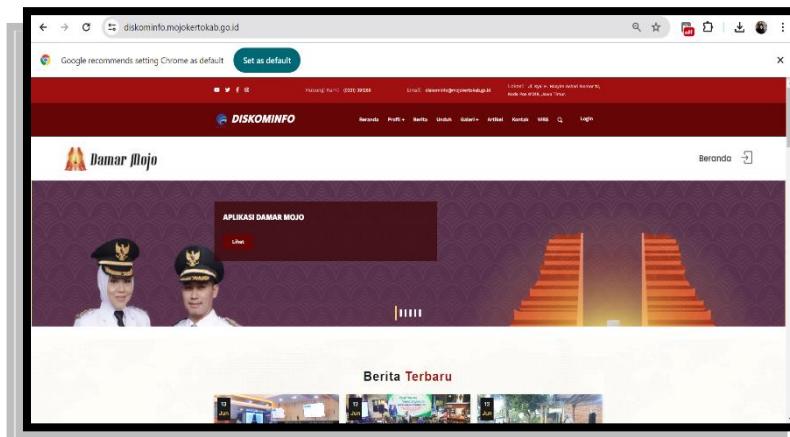
implementasi atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan transparansi informasi publik melalui pengelolaan website sebagai berikut :

- a. Portal pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui <https://mojokertokab.go.id/>. Masyarakat dapat mengetahui kegiatan pemerintah daerah dan dapat menggunakan website untuk mendapatkan layanan informasi dan layanan pengaduan lewat media online.



Gambar 2.3.2
Screenshot <https://mojokertokab.go.id/>

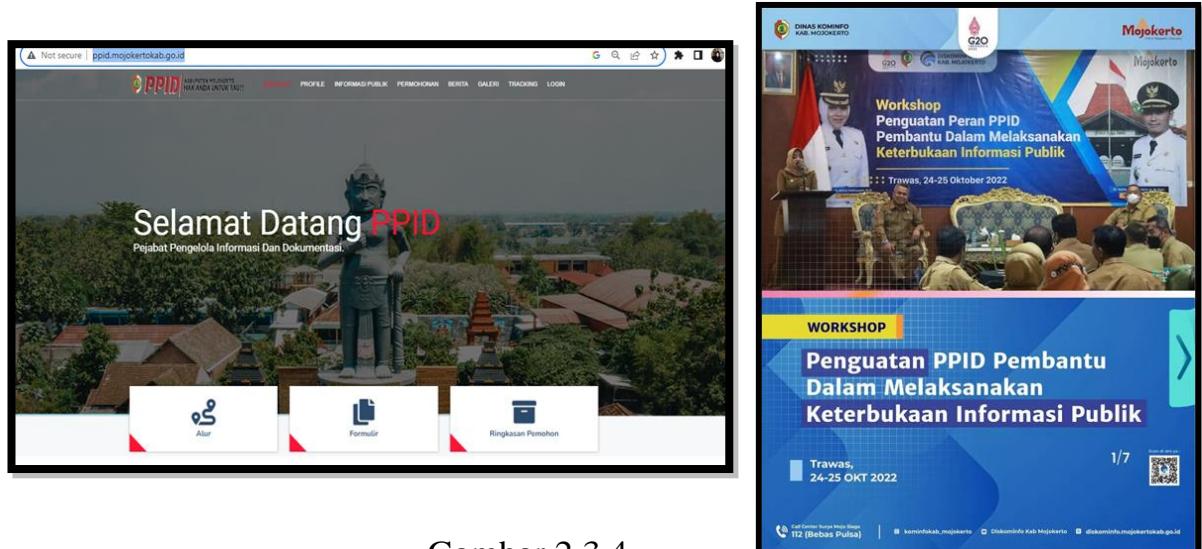
- b. Portal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto melalui <https://diskominfo.mojokertokab.go.id/> Masyarakat bisa mendapatkan informasi segala kegiatan Dinas Kominfo dan juga dapat mengakses segala layanan online yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto melalui *official website* Dinas Kominfo.



Gambar 2.3.3
Screenshot <https://diskominfo.mojokertokab.go.id/>

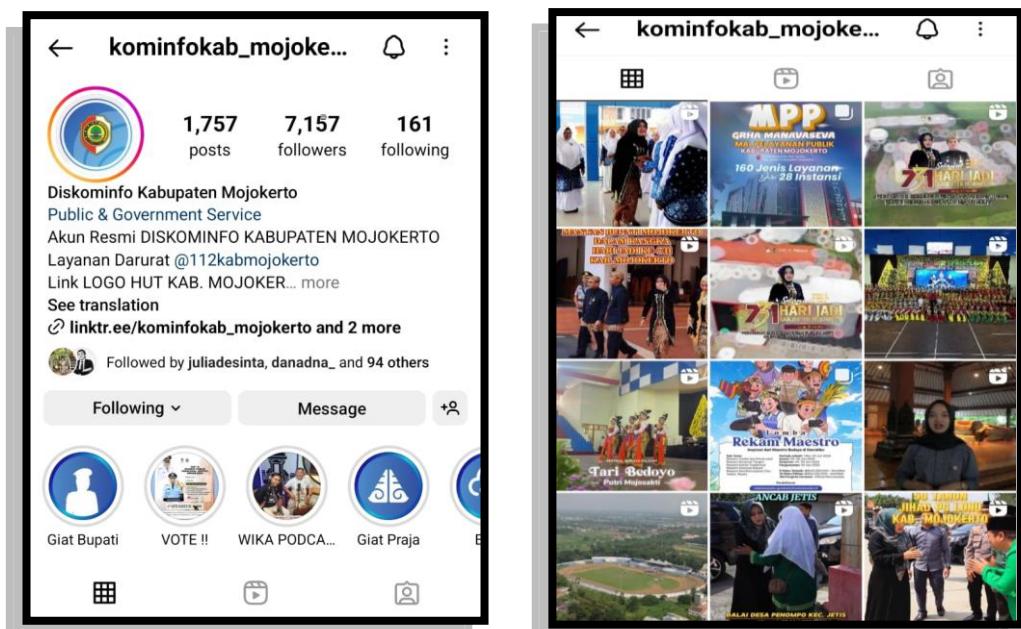
- c. Website PPID melalui <http://ppid.mojokertokab.go.id/>

Untuk keterbukaan informasi publik secara online telah dirumuskan penguatan portal website PPID Kabupaten dan PPID OPD yang berisikan Daftar Informasi Publik (DIP) yang terbagi dalam informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat serta informasi yang dikecualikan.



Gambar 2.3.4
Screenshot <http://ppid.mojokertokab.go.id>

- d. Media sosial melalui http://instagram.com/kominfokab_mojokerto; Masyarakat bisa mendapatkan informasi segala kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto melalui official akun instagram Dinas Kominfo.



Gambar 2.3.5
Screenshot http://instagram.com/kominfokab_mojokerto

e. Publikasi

Melalui wikafm.mojokertokab.go.id; [youtube.com wika TV](https://youtube.com/wika TV)



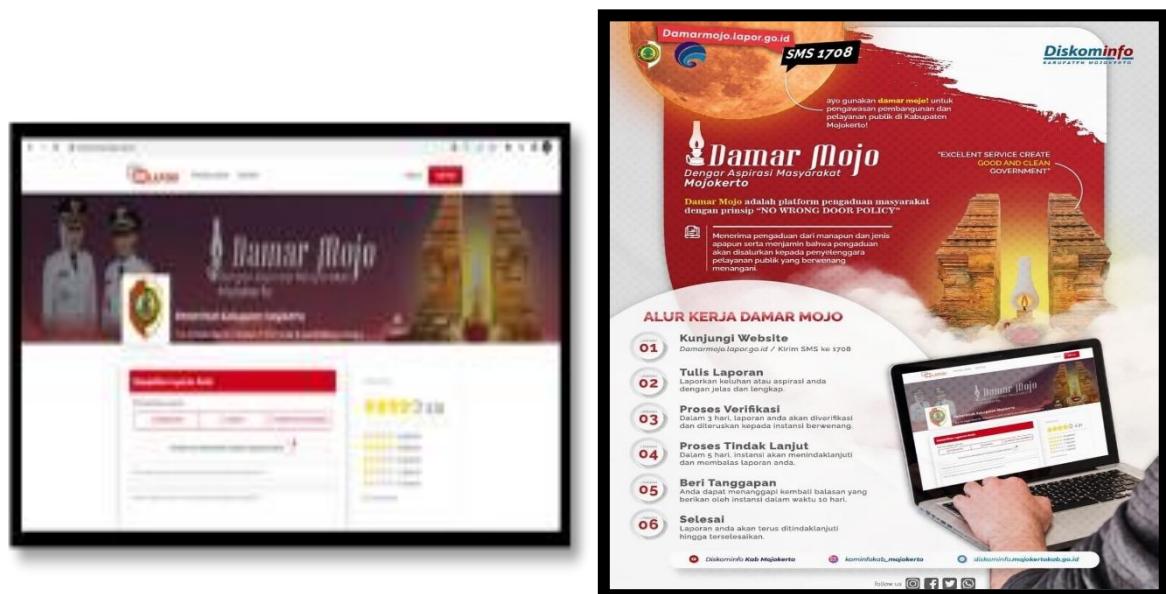
Gambar 2.3.6
Dokumentasi kegiatan podcast WIKA

Pelayanan yang tersebut diatas merupakan pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial)

3. Layanan Aspirasi Dan Pengaduan melalui damarmojo.lapor.go.id dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional www.lapor.go.id;

Dengar Aspirasi Masyarakat Mojokerto adalah platform yang hadir untuk menanggapi aspirasi, pertanyaan dan pengaduan masyarakat. Damar Mojo merupakan media sosial masyarakat dan pemerintah dengan prinsip mudah dan terpadu. Mudah karena bisa diakses melalui telepon seluler, internet dan aplikasi mobile. Dalam penggunaan situs damar mojo anda dapat bergabung dengan menggunakan akun facebook, twitter atau mengisi formulir sederhana yang tersedia. Setelah aktivasi akun, pengguna dapat login memberikan laporan berupa aspirasi atau pengaduan. Pastikan laporan anda dilaporkan secara kronologis, jelas dan lengkap juga disertai kategori laporan. Kirimkan laporan tersebut dan laporan anda akan masuk dalam antrian verifikasi laporan untuk dikelola melalui layanan aspirasi masyarakat (LAPOR) sebagai portal terpadu. Terpadu karena lapor terhubung

dengan instansi pemerintah, kementerian dan lembaga. Selain itu Damar mojo digunakan oleh pemda sebagai sistem pengelolaan laporan masyarakat dan satuan kerja perangkat. Sehingga laporan anda bisa terhubung dengan instansi pemerintah terkait. Laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu untuk kemudian didisposisikan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut. Percakapan antara masyarakat dan pemerintah dapat disertai data dukung untuk memperjelas substansi laporan. Damar mojo telah terhubung dengan 48 satuan kerja perangkat daerah 2 lembaga non pemerintah instansi dan terhubung dengan bupati Mojokerto.



Gambar 2.3.7
Screenshot <https://damarmojo.lapor.go.id/>

4. Layanan Panggilan Darurat Surya Mojo Siaga (Call Center 112)

layanan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan berbagai kejadian kegawatdaruratan, seperti kebakaran, tindak kriminal, kecelakaan, kebutuhan ambulans, dan keadaan gawat darurat lainnya yang ditangani dengan cepat melalui satu nomor telepon yaitu 112. Layanan Surya Mojo Siaga 112 ini aktif selama 24 Jam dalam melayani semua masyarakat Kabupaten Mojokerto. Selain itu, layanan ini juga bebas pulsa alias gratis.



Gambar 2.3.8
Screenshot dokumentasi Call Center 112

5. Layanan Hubungan Media

SIJAMED (Sistem Informasi Kerjasama Media) merupakan inovasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto, dalam rangka menjalankan tugas kerjasama media Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan media partner, secara transparan, efektif dan efisien.



Gambar 2.3.8
Screenshot <https://sijamed.mojokertokab.go.id/>

6. Layanan Informasi Telecenter

Merupakan pusat informasi bagi masyarakat berbasis TIK dalam rangka memberdayakan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat.

Selain itu telecenter dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan survei pasar, pemasaran dan transaksi. Dengan telecenter, masyarakat dapat melakukan banyak kegiatan komunikasi mencari informasi, berkomunikasi dengan pihak lain, dan mendapatkan layanan sosial dan ekonomi. Semuanya dilakukan dengan dukungan TIK, misalnya melalui telepon, komputer dan sambungan internet. Selain itu telecenter dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan survey pasar, pemasaran dan transaksi.

7. Layanan Internet melalui pembangunan *fiber optic*, *command center* dan *digital center*



Gambar 2.3.9
Command Center dan Control Room

8. Satu Data Palapa Kab. Mojokerto

Portel Satu Data Palapa merupakan media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel dalam lingkup Kabupaten Mojokerto.



Gambar 2.3.10
Screenshot <https://data.mojokertokab.go.id/>

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi oleh faktor Lingkungan strategis. Adapun lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan (*strengths*) (S) dan kelemahan (*weakness*) (W) dan lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunity*) (O) dan tantangan (*threats*) (T).

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*) yang merupakan faktor penentu yang dipandang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan menerapkan metode analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities dan threats*). Implementasi metode ini akan membantu Perangkat Daerah untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila Perangkat Daerah mengembangkan kelemahnya karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

1. Kekuatan (Strength)

- a. Tersedianya anggaran yang cukup untuk merealisasikan program kegiatan Dinas Komunikasi dan informatika

- b. Adanya regulasi Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Tersedianya sarana prasarana yang memadai;

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola dan pengguna TIK;
- b. Belum terintegrasinya Sistem Informasi, Database, Regulasi dan Tata Kelola TIK terutama dalam tataran petunjuk teknis pengelolaan TIK di tingkat Perangkat Daerah;
- c. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dengan mengoptimalkan pengembangan aplikasi TIK;

B. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

1. Peluang (Opportunities)

- a. Dukungan Pemkab Mojokerto dalam upaya transparansi, percepatan dan peningkatan layanan publik;
- b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;
- c. Kebutuhan pengembangan muatan *e-Government/ SPBE*;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan informasi terhadap layanan berbasis IT (adanya *Smart City*);

2. Ancaman (Threats)

- a. Globalisasi informasi dan pesatnya perkembangan TIK yang berdampak pada keterbukaan informasi publik sehingga kemungkinan kehilangan/kerusakan data akibat *system error/crash* dan kejahatan dunia maya;
- b. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata dan terdapatnya pengelolaan media informasi yang belum terjangkau sehingga masih ada kesenjangan informasi di masyarakat;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, merupakan pedoman untuk penyusunan Renja PD. Renja PD merupakan kebijakan *Top Down Planning* yaitu kebijakan yang harus mengikuti arah kebijakan dari pusat dan juga harus melaksanakan *Up Down Planning* yaitu harus mengadopsi usulan dari masyarakat sehingga PD nantinya menyelaraskan antara usulan dari bawah dan menyelaraskannya dengan kebijakan dari atas.

Review Terhadap Rancangan Awal Mojokerto akan di jelaskan pada tabel berikut :

T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah ; Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah; Indeks Profesionalitas ASN; Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	86 (A) 95,45 % 90 (Tinggi) 21 inovasi	7.313.014.697	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah ; Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah; Indeks Profesionalitas ASN; Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	86 (A) 95,45 % 90 (Tinggi) 21 inovasi	4.531.065.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	15.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Cetak dokumen perencanaan			(Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, PPRG, Rencana Aksi)	2.000.000	
						Belanja Perjadin Dalam Kota				5.500.000	

2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Cetak dokumen evaluasi kinerja PD				(LKJIP,LPPD ,LKPJ,SAKIP ,RB,SPIP,Mo nev Internal)	2.500.000
						Belanja Perjadin Dalam Kota					5.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.868.924.445	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.110.065.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.868.924.445	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4.110.065.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Gaji dan Tunjangan PNS (14 bln)				4.110.065.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				292.000.000						
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Diskominfo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	42.000.000						
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskominfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81 Orang	250.000.000						
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.355.090.252	Administrasi Umum Perangkat Daerah				102.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000						
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.111.590.252						
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	37.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Mamin Rapat 12x				22.000.000	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Belanja Barang Cetakan & Penggandaan				20.000.000	
10	Penyediaan Bahan/Material	Diskominfo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Diskominfo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						ATK Sekretariat				6.250.000	
						ATK Informatika				6.250.000	
						ATK KIP				6.250.000	
						ATK Statistik				6.250.000	

11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Mamin Tamu 5x kegiatan				5.000.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						SPPD Dalam dan Luar Daerah				30.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo			85.000.000						
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	85.000.000						
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo			187.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo			142.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	145.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Belanja Tagihan Listrik dan Telepon (12 bln)				100.000.000	

15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Honorarium tenaga non ASN sekretariat (2 orang)				42.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo			485.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo			162.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	85.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						BBM				38.000.000	
						Belanja Jasa Tenaga Supir (12 bln)				18.000.000	
						Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan				9.500.000	
						Belanja Pemeliharaan Kendaraan				19.500.000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Honorarium PPTK				22.920.000	
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Kebersihan)				12.680.000	

						Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				14.400.000	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Belanja Pemeliharaan AC				12.810.000	
						Belanja Pemeliharaan PC/Laptop				7.300.000	
						Belanja Pemeliharaan Printer				6.890.000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Mjk	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	72	7.850.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Mjk	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	72	4.988.595.140	Dana Alokasi Umum (DAU)
8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mjk	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	7.850.000.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mjk	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	4.988.595.140	Dana Alokasi Umum (DAU)
19	Relasi Media	Kab. Mjk	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	3.700.000.000	Relasi Media	Kab. Mjk	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	3.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					

						Belanja Jasa Advetorial				2.923.480.500	
						Belanja Makan dan Minum				15.043.500	
						Belanja Operasional dan Perjalanan Dinas				32.916.000	
						Honorarium PPTK				28.560.000	
20	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Mjk	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	15 Komunitas	200.000.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Mjk	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Operasional dan SPPD				5.000.000	
21	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Mjk	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20 Permohonan	1.050.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Mjk	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20 Permohonan	484.085.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Belanja Honorarium PBJ				680.000	
						Belanja Jasa Aplikasi Call Center				198.000.000	
						Honorarium Tenaga non ASN				198.000.000	
						Mamin Rapat				65.000.000	
						Operasional dan SPPD				20.500.000	
						BBM				1.905.000	

22	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Mjk	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	70 Rekomendasi	475.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Mjk	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	70 Rekomendasi	385.538.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Belanja Honorarium PBJ				680.000	
						BBM				6.048.000	
						Belanja Bahan Cetak				600.000	
						Materai				241.000	
						Souvenir				1.722.000	
						Mamin				7.500.000	
						Gaji Non ASN				57.000.000	
						Belanja Jasa Aplikasi IMA				199.800.000	
						Operasional dan SPPD				18.000.000	
						Belanja Jasa Penyusunan IKIP				93.947.000	
23	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Mjk	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	8 Media	2.425.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Mjk	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	8 Media	1.113.972.140	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :				536.121.500	
						Media luar ruang				57.036.300	
						Mamin				5.000.000	

						Gaji non ASN				327.340.000	
						Pemeliharaan dan Operasional WIKA FM				78.545.200	
						Operasional dan SPPD				68.200.000	
						Belanja Jasa Advetorial				577.850.640	DBHCHT
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Mjk	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	3,8	14.395.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Mjk	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	3,8	6.858.190.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
9	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mjk	Tingkat kematangan aspek teknologi informasi pada domain tata kelola SPBE	3,7	14.395.000.000	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mjk	Tingkat kematangan aspek teknologi informasi pada domain tata kelola SPBE	3,7	6.858.190.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
24	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kab. Mjk	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	111 Aplikasi	200.000.000						
25	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Kab. Mjk	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	40 Dokumen	200.000.000						
26	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Mjk	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	4 Laporan	1.200.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Mjk	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	4 Laporan	1.175.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Gaji THL				995.400.000	
						Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE				150.000.000	
						Belanja Lisensi SSL, Domain, Zoom, Appstore				30.000.000	
						Audit TIK				250.000.000	
						Penyusunan Dokumen Manajemen SPBE dan Proses Bisnis				300.000.000	

27	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kab. Mjk	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	150.000.000						
28	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Mjk	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	200.000.000						
29	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Mjk	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	8 Dokumen	195.000.000						
30	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Mjk	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	57 unit	150.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Mjk	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	46 Perangkat Daerah	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						SPPD				50.000.000	
						Review Masterplan Smartcity				150.000.000	
31	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Mjk	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	46 Perangkat Daerah	150.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Mjk	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	46 Perangkat Daerah	5.232.790.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Main Internet dan Backup				4.651.870.500	
						Managed service				300.000.000	
						Belanja perangkat jaringan				250.000.000	
						Honor PPTK				30.240.000	

						Honor PBJ				680.000	
32	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kab. Mjk	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasiona	6 Layanan	150.000.000						
33	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Mjk	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	3 Dokumen	200.000.000						
34	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Mjk	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	300.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Mjk	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						SPPD				50.000.000	
						Mamin Rapat				50.000.000	
						Narasumber				50.000.000	
						Sosialisasi Review Arsitektur SPBE				100.000.000	
35	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kab. Mjk	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	46 Perangkat Daerah	11.300.000.000						

IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Mjk	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,2	1.000.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Mjk	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,2	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mjk	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN)	100% 100% 100% 84,21%	1.000.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mjk	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN)	100% 100% 100% 84,21%	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
36	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Mjk	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	104 Orang	200.000.000						
37	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kab. Mjk	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	500.000.000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kab. Mjk	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
						Rincian :					
						Belanja Honorarium PPTK				14.400.000	
						Belanja BBM dan Pelumas				11.550.000	

						Belanja Makanan dan Minuman Rapat				50.000.000	
						Belanja Jasa Tenaga Administrasi				21.000.000	
						Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				36.000.000	
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa				33.750.000	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				11.800.000	
						Belanja Software (Library)				21.500.000	
38	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Mjk	Persentase kegiatan statistik sektorl yang rilis tepat waktu	80 Persentase	100.000.000						
39	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Mjk	Jumlah kegiatan statistik sektorl yang telah dilengkapi metadata	100 Dokumen	200.000.000						
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Mjk	Indeks KAMI	375	336.886.825	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Mjk	Indeks KAMI	375	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
11	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mjk	Persentase Layanan Elektronik yang Diamankan	85%	200.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mjk	Persentase Layanan Elektronik yang Diamankan	85%	340.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
40	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Mjk	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	200.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Mjk	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	340.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

						Rincian :					
						Pembuatan SOP Keamanan Informasi				25.000.000	
						Literasi Keamanan Informasi Agen CSIRT				50.000.000	

					Pelatihan dan Sertifikasi Penanganan Insiden Siber				30.000.000	
					Belanja Lisensi Antivirus & Antimalware System				15.000.000	
					Hacking Day Competition				70.000.000	
					Indeks KAMI				25.000.000	
					IT Security Assesment / Penetration Test				30.000.000	
					Belanja Mamin				25.000.000	
					Perjalanan Dinas				70.000.000	
12	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mjk		136.886.825	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mjk			160.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
41	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mjk	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	46 Perangkat Daerah	136.886.825	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mjk	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	46 Perangkat Daerah	160.000.000
						Rincian :				
						Lisensi Zoom Meeting (500 User)				10.000.000
						Perawatan / Maintenance Perangkat Radio Telekomunikasi Daerah				15.000.000
						Pengadaan Fasilitas Komunikasi Video Conference				20.000.000
						Bimtek Operasional Ratelta dan Bimtek PHKS Kerjasama dengan BSSN				100.000.000
						Perjalanan Dinas				15.000.000
JUMLAH				30.894.901.522					17.077.850.640	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diskominfo Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya forum konsultasi publik. Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. Melalui forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitik beratkan pada aspek teknokratis. Oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi / perguruan tinggi, LSM dan OPD di Provinsi. Dari hasil forum konsultasi tersebut, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan lebih terkait pada pelayanan publik di sektor-sektor pembangunan.

Tabel 2.5.1 Kamus Usulan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

KAMUS USULAN ASPIRASI MASYARAKAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

NO	ISU/BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN PERMASALAHAN	SATUAN	PERSYARATAN USULAN	JENIS USULAN	JENIS BELANJA			OPD PENANGGUNG JAWAB	
						ASPIRASI	POKIR	PROGRAM	HIBAH	BANSOS	
1	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pemasangan Wifi di area publik yang dikelola oleh Pemda (Objek Wisata, RTH, GOR dll)	Unit	1. Memberikan surat permohonan/proposal 2. Tersedia jaringan listrik 3. Foto/Dokumentasi; Titik Koordinat	√	√	√	√	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pelatihan TIK bagi masyarakat	Kegiatan	1. Memberikan surat permohonan/proposal 2. Mengajukan daftar peserta (minimal peserta 20 orang)	√	√	√	√	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika									
		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota									
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah									

3	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Sosialisasi layanan pengaduan masyarakat	Kegiatan	1. Memberikan surat permohonan/proposal 2. Merupakan bentuk Lembaga Desa 3. Minimal jumlah peserta 35 orang 3. Segala biaya ditanggung oleh pelaksana kegiatan/pemohon (desa)	√	√	√	√	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
		Pelayanan Informasi Publik								
4	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Promosi potensi desa melalui media komunikasi Pemda (<i>Podcast WIKA</i>)	Kegiatan	1. Membuat surat permohonan disertai bukti pendukung potensi desa yang akan dipublikasikan dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Desa	√	√	√	√	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik								



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

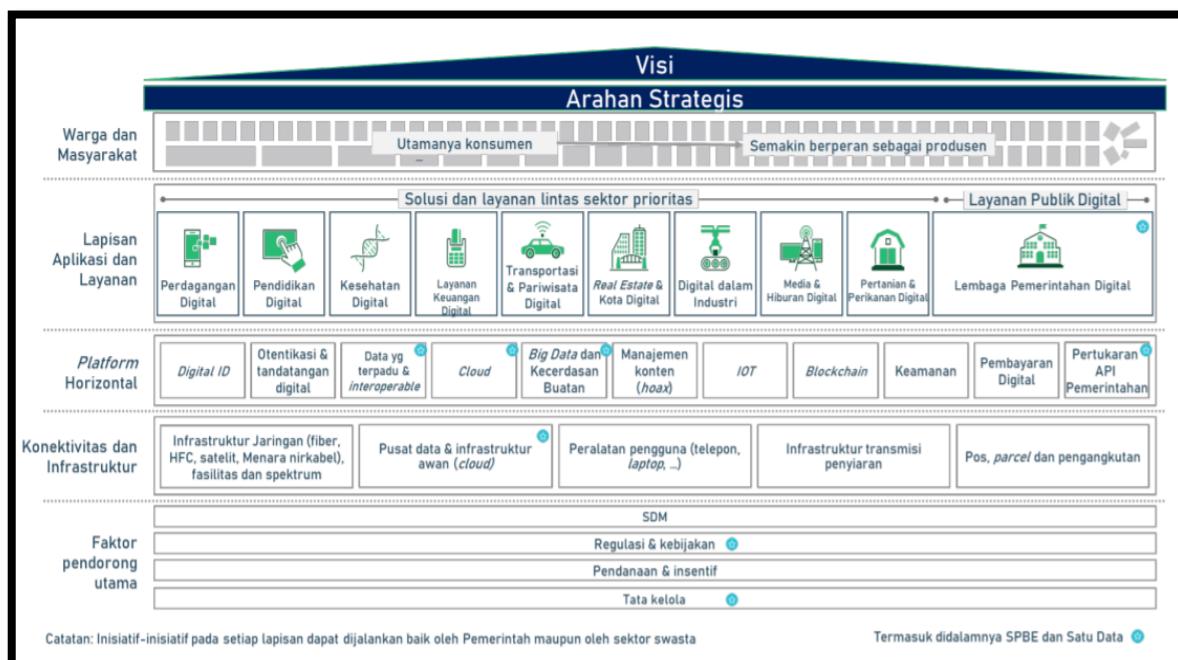
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 mengamanatkan 4 (empat) tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada RPJPN Tahap Ketiga yaitu Tahun 2015—2019, pembangunan nasional difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat. Pada RPJPN tahap akhir yakni RPJMN Tahun 2020—2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan highlight utama di pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Presiden Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum setelah berakhirnya pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet
2. Mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis
3. Mempercepat integrasi pusat data nasional
4. Mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta
5. Menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital. Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.



Gambar 3.1 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional
Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan peran

serta seluruh lapisan masyarakat, kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah pusat secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto pada satu dekade terakhir terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui rencana strategis lima tahunan yang disusun. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto berupaya merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyediaan layanan internet dan pengembangan TIK. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 dirancang dengan merujuk pada Perpres No. 18 Tahun 2020, dan dengan meninjau hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Kemenkominfo sebelumnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto secara aktif memiliki peran untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi, mendorong penggunaan tanda tangan digital, pengendalian konten, dan upaya pelindungan data pribadi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto juga memiliki program-program yang ditujukan langsung ke masyarakat untuk siap menghadapi era digital, contohnya program Literasi Digital untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam menggunakan internet dan perangkat TIK.

Transformasi digital menjadi salah satu prasyarat utama menuju 5 (lima) besar ekonomi dunia, dan menjadi semakin penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang sebelum pandemi Covid-19 yang sedang dalam momentum pertumbuhan. Akan tetapi, proses ini tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika saja, melainkan memerlukan sinergi dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto yang juga berjalan pada lanskap digital yang sama. Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluru. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 15 tentang Tata Kelola SPBE dan Peraturan Bupati tentang Satu Data, Dinas Komunikasi dan Informatika menginisiasi perancangan master plan Smart City, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi dan konektivitas digital. Transformasi Digital pada tahun 2023 diarahkan untuk: 1) Mengakselerasi

transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; 2) Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain; 3) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services). Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 merupakan bagian dari Renstra Kemenkominfo Tahun 2021—2026 yang diarahkan untuk mendukung 7 percepatan transformasi digital nasional, dimana fokus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah untuk menuntaskan penyediaan infrastruktur TIK, mendorong percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas pokok yaitu sebagai unsur SKPD, Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Pembangunan Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat nasional.

Tabel 3.1.1
Hasil Telaah Kebijakan dan Program Nasional

NO	ARAHAN/KEBIJAKAN	AGENDA/PROGRAM NASIONAL	STRATEGI	HIGHLIGHT SASARAN 2024	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Penunasan Infrastruktur TIK • Pemanfaatan Infrastruktur TIK • Fasilitas Pendukung Transformasi Digital 	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	Jangkauan infrastruktur jaringan tetap pitalebar (% total kecamatan)	60%
						Jangkauan infrastruktur jaringan bergerak pitalebar (% Desa)	95%
						Populasi yang terlayani penyiaran digital (%)	80%
						Fasilitasi <i>start up unicorn</i> baru (perusahaan)	8
2	Penyederhanaan Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): $\geq 2,6$ (predikat baik)	Konsolidasi Demokrasi	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50%
					Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Percentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik	Kab/Kota 50%
					Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Skor Global Cyber Security Index	0,838

Tabel 3.1.2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mojokerto

Arah Kebijakan				
2022	2023	2024	2025	2026
Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah dengan Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas SDM melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan dilandasi Nilai Keimanan dan Ketqwaan				

Tabel 3.1.3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian							Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan													
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.00	2.50	2.60	2.70	2.90	3.00	3.20	3.20		Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.1.4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto**Tahun 2021-2026****Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**

<p>Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <p>Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan</p>		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<p>Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan dan optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah</p>	<p>Sasaran 3.6 Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi</p>	<p>Strategi 3.6 Upaya pengembangan sistem informasi dengan ditunjang sarana dan prasarana IT yang memadai</p>

Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung atas pelaksanaan misi dan program politis serta program nomenklatur sebagai berikut :

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan

- Program Politis Misi ke 3
 - 1) Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government*
- Program Nomenklatur Misi ke 3
 1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 2. Program Aplikasi Informatika
 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Di tahun 2021 Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2018 dilakukan pencabutan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Sebagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan sasaran dan target kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2026.

Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun 2025 adalah:

Tujuan :

“Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.”

Sasaran :

“Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”

Indikator Sasaran :

“Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).”

Tabel 3.1.5

**TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
MOJOKERTO
TAHUN 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -
1	Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,8

Tabel 3.1.6

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,8

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,45 %
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	90 (Tinggi)
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	21 Inovasi

Tabel 3.1.7
CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

<p style="text-align: center;">TUJUAN OPD (SASARAN PEMDA)</p> <p style="text-align: center;">Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi</p> <p style="text-align: center;">INDIKATOR TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p style="text-align: center;">SASARAN</p> <p style="text-align: center;">Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p style="text-align: center;">INDIKATOR SASARAN</p> <p style="text-align: center;">Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p>			
<p>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK</p> <p>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>Indeks Keterbukaan Informasi Publik 72</p> <p>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan</p>			
<p style="text-align: center;">BIDANG INFORMATIKA</p> <p>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <p>Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE 3,8</p> <p>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Tingkat kematangan aspek teknologi informasi pada domain tata kelola SPBE</p>			
<p>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</p> <p>Indeks KAMI 375</p> <p>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Persentase Layanan Elektronik yang Diamankan 85%</p>			
<p>BIDANG PENGELOLAAN DATA STATISTIK</p> <p>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 3,2</p> <p>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistic 100%</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100%</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan 100%</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN) 84,21%</p>			

Relasi Media	
Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas
Pelayanan Informasi Publik	
Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundungan	20 Permohonan
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	70 Rekomendasi
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	8 Media

Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	4 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	46 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	46 Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	46 Perangkat Daerah		
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			
Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen		

Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%

3.3 Program Dan Kegiatan

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah *stakeholders* dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistik, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diharapkan terjadi kejelasan, ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto telah dilakukan pemetaan/*mapping* berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 pada tahapan rancangan awal. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun 2025 yaitu sejumlah 5 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan sesuai dengan sasaran rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.7

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8	Penyediaan Bahan/Material
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
7	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16	Relasi Media

17	Pelayanan Informasi Publik
18	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
19	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
8	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
21	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
22	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
23	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
24	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
9	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
25	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
10	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
26	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
11	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
27	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain :

a. Pencapaian visi dan misi bupati

Sebagaimana telah dijabarkan pada poin 3.2

b. Percepatan transformasi digital

Sebagaimana telah dijabarkan pada poin 3.1

c. Indikator Kinerja Kunci bidang urusan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan informatika sebagaimana tersaji dalam tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN MOJOKERTO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86,25	4.606.065.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		86,25	6.101.370.667
2.16.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan		100%	15.000.000			100%	40.000.000
2.16.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	6 Dokumen	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 Dokumen	20.000.000
2.16.01 .2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	7 Laporan	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 Laporan	20.000.000
2.16.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan		100%	4.110.065.000				5.112.370.667
2.16.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	29 Orang/bulan	4.110.065.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		29 Orang/bulan	5.112.370.667
2.16.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100%	102.000.000				222.000.000
2.16.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskominfo	12 Paket	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Paket	40.000.000
2.16.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket	27.000.000
2.16.01 .2.06.0 007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Diskominfo	2 Paket	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Paket	50.000.000
2.16.01 .2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo	5 Laporan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Laporan	5.000.000
2.16.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	60 Laporan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		60 Laporan	100.000.000

2.16.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan		100%	142.000.000				192.000.000
2.16.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskominfo	12 Laporan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	150.000.000
2.16.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskominfo	12 Laporan	42.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	42.000.000
2.16.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100%	237.000.000				535.000.000
2.16.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Diskominfo	15 Unit	160.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		15 Unit	150.000.000
2.16.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskominfo	3 Unit	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Unit	350.000.000
2.16.01 .2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskominfo	30 Unit	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Unit	35.000.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		72 nilai	4.988.595.140			72	7.810.000.000
2.16.02 .2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		100%	4.988.595.140	Dana Alokasi Umum (DAU) ; DBHCH T		100%	7.810.000.000
2.16.02 .2.01.0 014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab Mojokerto	12 Laporan	3.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	3.800.000.000
2.16.02 .2.01.0 017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab Mojokerto	20 Permohonan	489.085.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		20 Permohonan	1.100.000.000
2.16.02 .2.01.0 019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kab Mojokerto	70 Rekomendasi	385.538.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		70 Rekomendasi	475.000.000
2.16.02 .2.01.0 021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab Mojokerto	8 Media	1.113.972.140	Dana Alokasi Umum (DAU) ; DBHCH T		8 Media	2.435.000.000
					536.121.500	DAU			
					577.850.640	DBHCHT			

2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE		3,8	21.855.640.000			3,9	12.950.000.000
2.16.03 .2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kematangan aspek teknologi informasi pada domain tata kelola SPBE		3,7	21.855.640.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3,7	12.950.000.000
2.16.03 .2.02.0 015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab Mojokerto	4 Laporan	1.175.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	1.200.000.000
2.16.03 .2.02.0 023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Kab Mojokerto	46 Perangkat Daerah	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		46 Perangkat Daerah	150.000.000
2.16.03 .2.02.0 024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab Mojokerto	46 Perangkat Daerah	20.230.240.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		46 Perangkat Daerah	11.300.000.000
2.16.03 .2.02.0 028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab Mojokerto	1 Dokumen	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	300.000.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		3,2 nilai	425.000.000			3,5	600.000.000
2.20.02 .2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektorl sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN)		100% 100% 100% 84,21%	425.000.000			100% 100% 100% 84,21%	600.000.000
2.20.02 .2.01.0 008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kab Mojokerto	100%	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	500.000.000
2.20.02 .2.01.0 009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektorl yang rilis tepat waktu	Kab Mojokerto	80%	175.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	100.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI		375 nilai	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		400	360.468.903

2.21.02 .2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Layanan Elektronik yang Diamankan		85%	340.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		85%	200.000.000
2.21.02 .2.01.0 003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab Mojokerto	4 Laporan	340.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	200.000.000
2.21.02 .2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi		100%	160.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	160.468.903
2.21.02 .2.02.0 001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab Mojokerto	46 Perangkat Daerah	160.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		46 Perangkat Daerah	160.468.903
JUMLAH					32.375.300.140				27.821.839.570



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Program dan kegiatan di tahun 2025 disusun dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 5 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang terdiri dari 15 sub kegiatan rutin (program penunjang urusan pemerintahan daerah) dan 12 sub kegiatan pembangunan.

Anggaran yang diusulkan pada Rencana Kerja TA.2025 yaitu Rp. 32.375.300.140,- meliputi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD 2025 sebesar Rp. 31.797.449.500,- dan DBHCHT sebesar Rp577.850.640,- sesuai usulan Program Kegiatan Tahun 2025 pada aplikasi SIPD sebagaimana tercantum pada matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah pelaksana program, RKPD Tahun 2025 yang ditindak lanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya wajib memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025, maka pelaksanaan program pembangunan harus benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif danefisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar perangkat daerah maupun perangkat daerah

dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan maka dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Adapun rencana kerja dan pendanaan disajikan dalam matrik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 hasil *printout* SIPD sebagaimana terlampir.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MOJOKERTO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						32.375.300.140,00							31.556.929.850,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						32.215.300.140,00							31.406.929.850,00			
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						31.290.300.140,00							30.046.460.947,00			
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			86,25 nilai	4.446.065.000,00						-	7.636.460.947,00			
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	-			100 %	15.000.000,00				-	PP7 - Peni ngkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningka tan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-	-	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peni ngkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningka tan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peni ngkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningka tan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peni ngkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningka tan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-		0,00			-	PP7 - Peni ngkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningka tan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-	-	85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peni ngkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningka tan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-	-	85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peni ngkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningka tan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	27.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peni ngkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningka tan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-			72 nilai	4.988.595.140,00						-	8.010.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				70 Rekomendasi	385.538.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningkatan kondisifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		475.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				8 Media	1.113.972.140,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningkatan kondisifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		2.435.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	-			3,8 nilai	21.855.640.000,00					-		14.400.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kematangan aspek teknologi informasi pada domain tata kelola SPBE	-			3,7 nilai	21.855.640.000,00			-	PP7 - Peni ngkatan Ke tenteraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningka tan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-	-	14.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional															200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis															200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				80 Percentase	175.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningkatan kondisifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				100 Dokumen	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningkatan kondisifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						500.000.000,00								360.468.903,00		
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI	-			375 nilai	500.000.000,00						-		360.468.903,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Layanan Elektronik yang Diamankan undefined	-			85 % undefined undefined	340.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-	-	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				4 Laporan	340.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-	-	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	-			100 %	160.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningkatan kondisifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-	-	160.468.903,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				46 Perangkat Daerah	160.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7. Peningkatan kondisifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		160.468.903,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	X	NON URUSAN						160.000.000,00								150.000.000,00		
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						160.000.000,00								150.000.000,00		
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	160.000.000,00						-		150.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	-			100 % undefined undefined	160.000.000,00			-	7. Peningkatan kondisifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik		-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	160.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan kondisifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	J U M L A H							32.375.300.140,00							31.556.929.850,00			



5.1. Catatan penting

1. Perlunya mendukung upaya menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan *Smart City* di Kabupaten Mojokerto dengan membentuk suatu sistem yang terintegrasi.
2. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengetahuan dalam mewujudkan Satu Data Palapa di Kabupaten Mojokerto dengan membuat basis data yang terpadu yang akan dipakai dalam mendukung perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Mojokerto.
3. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam implemenatai keterbukaan informasi publik.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika ini memuat antara lain :

1. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika yang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan fungsi.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan melalui Musrenbang.
4. Peranan masyarakat dan perkembangan teknologi digital dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan.
5. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang telah disusun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2025. Selain itu, rencana kerja tahun 2025 juga akan dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2025 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan pada tahun 2025 akan ada landasan dan arah yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menyelenggarakan program pemerintah dan memberikan pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700927 199101 1 002